

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Basrief, 2013, *Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia)*, Cetakan 1, Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Bappenas, 2019, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, Berkesinambungan*, Kementerian PPN, Jakarta.
- Davies, Pamela, Peter Francis and Victor Jupp, 2003, *Victimisation: Theory, Research and Policy*, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dignan, James, 2005, *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open University Press, Maidenhead.
- Effendi, Erdianto, 2021, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eliza, Pocut *et al.*, 2016, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Gosita, Arif, 1995, *Viktimologi dan KUHP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- H.S., Salim, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Meliala, Adrianus, 2011, *Viktimologi: Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan*, Departemen Kriminologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munawwarah, Qurrotul, 2010, *Praktik-Praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, LPAI-M, Malang.
- Qamar, Nurul & Farah S. Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Shant, Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Nomatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sepulveda, Magdalena, *et al.*, 2004, *Human Rights Reference Handbook*, University for Peace, San Jose.

Surachman, EQ. RM dan Jan S. Maringka, 2016, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, CV. Alfabeta, Bandung.

Susanto, Anton F., 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung.

Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta.

Takariawan, Agus, 2016, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Tarigan, Maria I, *et al.*, 2021, *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana*, Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Wibowo, Kurniawan Tri, 2020, *Hukum Acara Pidana: Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.

## **B. Jurnal, Tesis, Makalah**

Djohansjah, J., "Akses Menuju Keadilan (*Access to Justice*)", *Makalah, Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Jejaring Komisi Yudisial RI*, diselenggarakan oleh Puham UII bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, Bandung, 30 Juni-3 Juli 2010.

Duron, Jacquelynn F. “Legal Decision–Making in Child Sexual Abuse Investigations: A Mixed–Methods Study of Factors that Influence Prosecution”, *Child Abuse & Neglect The International Journal*, Volume 79, May 2018.

Gender and Women’s Health, Family and Community Health Injuries and Violence Prevention, Noncommunicable Diseases and Mental Health, 2003, *Guidelines for Medico-Legal Care of Victims of Sexual Violence*, World Health Organization (WHO), Geneva.

Hafrida dan Helmi, 2020, “Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, September 2020.

Krug, Etienne G. *et al*, 2002, *World Report on Violence and Health*, World Health Organization (WHO), Geneva.

Mahendra, Alfian dan Harefa, Beniharmoni, “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Kherta Semaya*, Volume 8, Nomor 10, 2020.

Nasarudin, Tubagus Muhammad, “Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2, Agustus 2016.

Natalia, Lasma, “Aspek Viktimologi Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Pada Penanganan Kasus Kekerasan Seksual”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, September 2018.

Qhistina, Laila, 2020, *Peran Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Spohn, Cassia, “Sexual Assault Case Processing : The More Things Change, the More They Stay the Same”, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2020.

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia*, Volume 8, Nomor 1, 2014.

United Nations Development Programme (UNDP), 2005, *Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*, United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok.

UN Women in Partnership with The Council Of Europe, 2016, *Guidance Note: Framework For Measuring Access To Justice Including Specific Challenges Facing Women*, UN Women, New York.

World Health Organization (WHO), 2020, *Global Status Report On Preventing Violence Against Children 2020*, World Health Organization (WHO), Geneva.

Yulia, Rena, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.

### C. Internet

Advianti, Maria, Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Lindungi Anak Indonesia dari Kekerasan Seksual”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual>, diakses pada 03 Oktober 2022.

CNN Indonesia, 2022, “14.517 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Sepanjang 2021”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses 31 Januari 2022.

Convention on the Rights of the Child, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/convention-rights-child>, diakses 31 Januari 2022.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016, “(Perppu) Pemerintah yang Lari Dari Tanggungjawab Atas Korban”, <https://icjr.or.id/perppu-pemerintah-yang-lari-dari-tanggungjawab-atas-korban/>, diakses 15 April 2022.

\_\_\_\_\_, 2016, “Perppu No 1 Tahun 2016 (Sengaja) Melupakan Korban : 9 Catatan Kritis ICJR terhadap Perppu No 1 Tahun 2016”, <https://icjr.or.id/perppu-no-1-tahun-2016-sengaja-melupakan-korban-9-catatan-kritis-icjr-terhadap-perppu-no-1-tahun-2016/>, diakses 15 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2022, “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, <https://kbbi.web.id/anak>, diakses 31 Januari 2022.

Kansil, Nova, “Kapasitas Diri”, <https://fip.ung.ac.id/2022/08/10/kapasitas-diri/>, diakses 13 Januari 2023.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Bank Data Perlindungan Anak - Data Kasus Pengaduan Anak Tahun 2016-2020", <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses 31 Januari 2022.

\_\_\_\_\_, "Bank Data Perlindungan Anak - Data Kasus Perlindungan Anak 2021", <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>, diakses tanggal 03 Oktober 2022.

\_\_\_\_\_, "Bank Data Perlindungan Anak - Data Kasus Perlindungan Anak Januari – September 2022", <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>, diakses pada 03 Oktober 2022.

Kompas.TV, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kasus Pelecehan Terus Menimpa Anak-Anak dan Perempuan", 2021, <https://www.kompas.tv/article/236963/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kasus-pelecehan-terus-menimpa-anak-anak-dan-perempuan>, diakses 23 April 2022.

United Nations (UN), 2022, "Children", <https://www.un.org/en/global-issues/children>, diakses 16 Juni 2022.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), 2022, "Child Protection", <https://www.unicef.org/protection>, diakses 16 Juni 2022.

\_\_\_\_\_, "Child Protection and Inclusion", <https://www.unicef.org/what-we-do>, diakses tanggal 16 Juni 2022.

United Nations Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR), "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>, diakses tanggal 05 September 2022.

\_\_\_\_\_, "Guidelines on the Role of Prosecutors adopted 07 September 1990 by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders", <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors>, diakses 13 Januari 2023.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084).

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-007/A/JA/10/2016 Tentang Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-24/E/Ejp/12/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan (SOP) Perkara Tindak Pidana Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1575).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 725).

Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana.

#### **E. Konvensi Internasional**

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), General Recommendation No. 35 On Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19, 26 July 2017.*

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985.*

*Doha Declaration On Integrating Crime Prevention And Criminal Justice Into The Wider United Nations Agenda To Address Social And Economic Challenges And To Promote The Rule Of Law At The National And International Levels, And Public Participation, 13th United Nations Congress On Crime Prevention And Criminal Justice, Doha, 12–19 April 2015.*

*Guidelines on the Role of Prosecutors adopted 07 September 1990 by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.*

*Kyoto Declaration On Advancing Crime Prevention, Criminal Justice And The Rule Of Law: Towards The Achievement Of The 2030 Agenda For Sustainable Development, 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Kyoto, Japan, 7–12 March 2021.*